

Katalog : 4601001.34

STATISTIK POLITIK dan KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATISTIK POLITIK dan KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016

ISSN : 2460-3139
Nomor Publikasi : 34520.1707
Nomor Katalog : 4601001.34
Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 59

Naskah
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kover :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh
©Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 yang merupakan publikasi ke-sembilan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta (BPS DIY). Penerbitan ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi BPS untuk menyediakan dan melakukan publisitas data yang lebih beragam dan terjaga kualitasnya. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan data yang semakin cepat dan beragam.

Publikasi ini berisikan informasi terkait tingkat keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi jumlah dan jenis tindak kriminalitas, pelaku, korban, serta upaya penanggulangannya. Disamping itu juga penyajian situasi politik Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada data hasil pemilu dan pemilukada serta produk hukum yang dihasilkan DPRD. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan publikasi berasal dari Polres/Polresta/Polda, Kanwil Hukum dan Ham, Kejaksaan, Kehakiman, KPU, Sekretariat DPRD, dan DPPKA di D.I.Y.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Yogyakarta, November 2017

Badan Pusat Statistik

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala,



Johaness De Britto Priyono, M.Sc

ABSTRAKSI

Stabilitas politik, keamanan dan ekonomi yang baik merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan. Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang baik akan meningkatkan investasi, menumbuhkan daya saing masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu stabilitas politik dan keamanan tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang otoriter dan harus berbasis pada demokrasi sehingga daerah itu menjadi sehat. Pada tahun 2016 stabilitas ekonomi, politik dan keamanan DIY dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,05 persen, inflasi sebesar 2,29 persen dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 85,58.

Pada tahun 2016 jumlah polisi yang bertugas di D.I. Yogyakarta sebanyak 10.043 orang atau meningkat 0,19 persen dibanding tahun 2015. Namun demikian ternyata beban tugas polisi juga semakin meningkat, seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan dinamika ekonomi sosial masyarakatnya. Dilihat menurut wilayah tugasnya, polisi di Kabupaten Gunungkidul memiliki beban pelayanan paling besar (687 orang) sedang polisi di Kota Yogyakarta beban pelayanannya paling kecil (244 orang).

Selama tahun 2016 jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di DIY sebanyak 6.766 kasus atau menurun 5,96 persen dibanding tahun 2015. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi, dan diikuti Kota Yogyakarta serta paling sedikit Kabupaten Gunungkidul. Persentase penyelesaian tindak kejahatan di DIY masih rendah (48,64 persen), dan sementara itu selang waktu tindak kejahatan juga relatif singkat (1 jam 17 menit) sehingga tunggakan perkara tindak kejahatan cenderung meningkat. Dilihat dari jenisnya, tindak kejahatan di DIY didominasi oleh penipuan dan perbuatan curang (20,15 persen), diikuti pencurian dengan pemberatan (17,54 persen) dan pencurian biasa (14,16 persen). Dilihat dari golongannya, tindak kejahatan di DIY didominasi oleh kejahatan terhadap kekayaan negara (55,05 persen) diikuti kejahatan konvensional (41,75 persen).

Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2016 di DIY sebanyak 6.772 orang (99,91 persen orang dewasa dan 0,09 persen anak-anak). Sebanyak 31,19 persen pelaku tindak kejahatan berasal dari Kabupaten Sleman, 26,61 persen dari Kota Yogyakarta dan paling

kecil (5,21 persen) dari Kabupaten Gunungkidul. Jika dilihat menurut jenis kelamin, secara umum pelaku tindak kejahatan didominasi oleh laki-laki (95,23 persen) dan 4,77 persen lainnya adalah perempuan. Sementara itu pelaku tindak kejahatan anak-anak semua berasal dari Kabupaten Sleman.

Situasi politik di DIY dapat digambarkan diantaranya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2014. Untuk pemilu legislatif, hasil perolehan suara terbanyak diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diikuti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.771.964 jiwa, 80,04 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 19,96 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 92,78 persen suara dinyatakan sah dan 7,22 persen suara tidak sah. Untuk Pemilu Presiden, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.812.144 jiwa. Sebanyak 76,84 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 23,06 persen golput. Dari perolehan suara tersebut 98,50 persen dinyatakan sah dan 1,50 persen suara tidak sah.

Pada tahun 2016, kinerja DPRD Provinsi DIY dinilai meningkat. Dalam bidang legislasi, jumlah produk hukum yang dihasilkan meningkat sebesar 3,36 persen. Dalam bidang anggaran, menyetujui alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 27,50 persen, dan untuk sektor kesehatan sekitar 9,74 persen dari total anggaran.

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman merupakan 3 wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Lebih dari 65 persen penduduk yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya dan perolehan suara untuk pasangan bupati terpilih mencapai lebih dari 39 persen.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2016, IDI DIY sebesar 85,58 naik 2,39 poin dibandingkan tahun 2015. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di DIY tetap bertahan pada kategori baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Metodologi	
2.1 Jenis dan Sumber Data.....	7
2.2 Konsep dan Definisi.....	7
2.3 Penjelasan Teknis.....	10
Bab III Gambaran Umum Kriminalitas di D.I. Yogyakarta	
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	13
3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta.....	14
3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan.....	15
3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan.....	17
Bab IV Gambaran Umum Politik D.I. Yogyakarta	
4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014.....	19
4.2. Peran DPRD.....	20
4.3. Pemilihan Kepala Daerah.....	21
4.4. Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	22
Tabel-tabel	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Rasio Penduduk per Polisi di D.I.Yogyakarta Tahun 2016.....	13
Gambar 3.2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2016.....	15
Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	16
Gambar 3.4 Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	17
Gambar 4.1 Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 Menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	19
Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	21
Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta 2012-2016.....	24
Gambar 4.4 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2015-2016.....	25

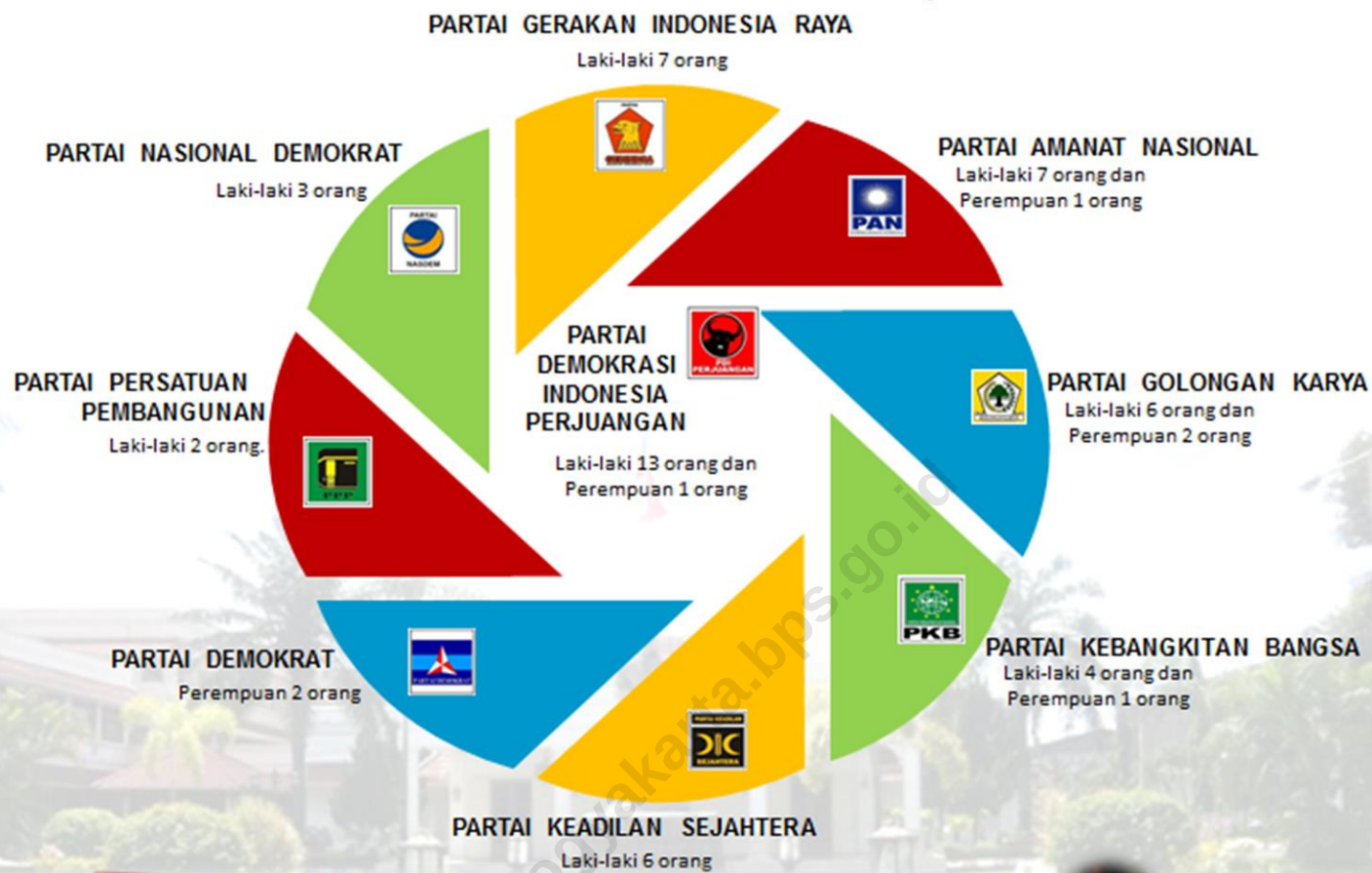
DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	29
Tabel 2	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016	30
Tabel 3	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	31
Tabel 4	Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	31
Tabel 5	Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014	32
Tabel 6	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016.....	32
Tabel 7	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	33
Tabel 8	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) di D.I. Provinsi Yogyakarta Tahun 2014– 2016.....	33
Tabel 9	Selang Waktu (<i>Crime Clock</i>) Tindak Kejahatan Menurut Golongan Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016 (menit) ...	34
Tabel 10	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016....	34
Tabel 11	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenisnya per Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	35
Tabel 12	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	36
Tabel 13	Banyaknya Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	37
Tabel 14	Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 2016.....	38

Tabel 15	Jumlah Penyelesaian Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 2016.....	39
Tabel 16	Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016.....	40
Tabel 17	Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	41
Tabel 18	Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Jenisnya di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2014..	42
Tabel 19	Jumlah Jaksa dan Non Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2016.....	43
Tabel 20	Jumlah Hakim dan Non Hakim Menurut Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2016.....	44
Tabel 21	Jumlah Perkara Penting Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	45
Tabel 22	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Umum, Tahun 2016.....	46
Tabel 23	Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta, Tahun 2016.....	47
Tabel 24	Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	48
Tabel 25	Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	49
Tabel 26	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016	50
Tabel 27	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016	51
Tabel 28	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016	52
Tabel 29	Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016	52
Tabel 30	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Provinsi D.I Yogyakarta (DPRD Prov.).....	53

Tabel 31	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Provinsi D.I Yogyakarta (DPRD Kab./Kota).....	53
Tabel 32	Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di Provinsi D.I. Yogyakarta	54
Tabel 33	Jumlah Penduduk yang Terdaftar Dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Provinsi D.I Yogyakarta	54
Tabel 34	Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2012 – 2016 (dalam rupiah).....	55
Tabel 35	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013 – 2016.....	55
Tabel 36	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Provinsi D.I.Yogyakarta	56
Tabel 37	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	56
Tabel 38	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	57
Tabel 39	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota Hasil Pilkada Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya di Provinsi D.I. Yogyakarta	57
Tabel 40	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2011-2015.....	58
Tabel 41	Perkembangan Skor Indikator IDI 2014 dan 2015.....	59

JUMLAH ANGGOTA DPRD DIY, MENURUT ASAL PARTAI POLITIK, 2016



Jumlah kejahatan

Crime Total

di Daerah Istimewa
Yogyakarta

Pengertian

Jumlah seluruh kejahatan yang tercatat di kepolisian pada satu tahun atau biasa disebut dalam data polisi jumlah laporan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Perubahan politik juga terjadi di D.I. Yogyakarta ditandai dengan disahkannya **Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta** (UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta) pada tanggal 30 Agustus 2012 oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR RI. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, diharapkan masyarakat luas bisa lebih mencermati kinerja pemerintahan. Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan keterbukaan tersebut, secara tidak langsung akan memicu para pejabat daerah untuk lebih bekerja keras dan terbuka dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Beragam kepentingan masyarakat yang ada tidak menutup ruang untuk mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai saluran, diantaranya melalui jalur formal lewat pembentukan partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk tumbuh sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada pemilu tahun 1999, dan terus berubah hingga pada pemilu 2014 tersisakan 10 partai politik .

Kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan. Pada tahun 2016 stabilitas ekonomi, politik dan keamanan D.I. Yogyakarta dalam kondisi baik. Kondisi ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,05 persen, Inflasi sebesar 2,29 persen, dan demokrasi berjalan baik dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 85,58.

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu pula setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti halnya kebutuhan sosial yang meliputi status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “..Pemerintah

dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2016 ini berbagai informasi tentang fenomena politik dan keamanan tahun 2016 di D.I. Yogyakarta dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi keamanan dan politik masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta masyarakat beserta DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DIY 2016 menyajikan gambaran politik, kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal, serta upaya mewujudkan keamanan di wilayah D.I. Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Dua bab berikutnya adalah menyajikan gambaran umum kriminalitas (Bab III) dan gambaran umum politik (Bab IV).

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB II. METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari Podes 2014, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, KPUD, Kesbanglinmas, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah dan DPPKA Pemda D.I.Yogyakarta.

2.2 Konsep dan Definisi

A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

1. *Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian* adalah
 - ✓ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - ✓ Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - ✓ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - ✓ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - ✓ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - ✓ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- ✓ Orang yang melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang turut melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (Common Law Crime) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

D. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat "*dark number*".

F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (Crime Rate) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

H. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan; membujuk orang lain dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

I. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

J. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

K. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

L. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

- Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

O. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

P. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Q. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah;

a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar
 t = tahun t

b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

e. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol (*crime index*)

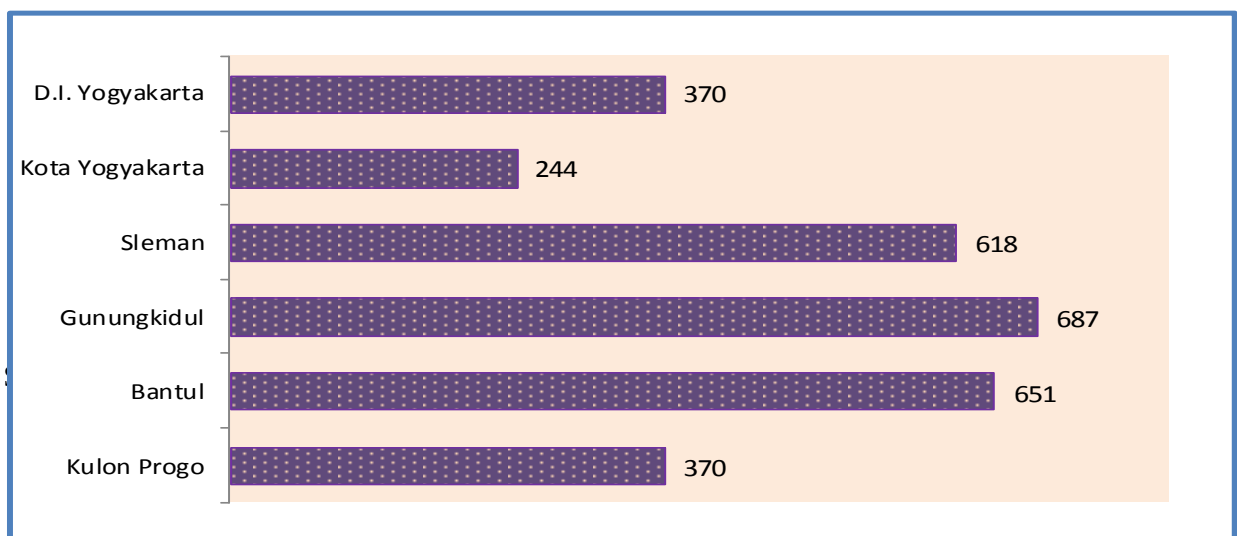
$$\text{Indeks Kriminal} = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t_0} \times 100\%$$

BAB III. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI D.I. YOGYAKARTA

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Keamanan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Upaya menjaga stabilitas keamanan di D.I. Yogyakarta didukung oleh kelengkapan prasarana keamanan antara lain 60 pos polisi, 80 polsek/polsekta, 5 Polres/polresta, serta 1 polda. Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah D.I. Yogyakarta cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah polisi yang bertugas di wilayah ini bertambah sekitar 0,19 persen dibanding tahun 2015 jauh lebih kecil dari pertambahan jumlah penduduk dan akibatnya rasio penduduk per polisi juga semakin meningkat. Ini berarti rata-rata beban tugas polisi dalam pelayanan masyarakat menjadi meningkat. Pada tahun 2016 rasio penduduk per polisi di D.I. Yogyakarta sebesar 370, sementara pada tahun 2015 sebesar 366. Artinya pada tahun 2015 setiap 1 polisi melayani 366 penduduk, sedang tahun 2016 meningkat menjadi 370 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota rasio penduduk per polisi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 687, sedangkan terkecil berada di Kota Yogyakarta yaitu 244. Dengan kata lain polisi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai beban pelayanan paling besar yaitu setiap seorang polisi melayani 687 penduduk, sedangkan beban pelayanan terkecil di Kota Yogyakarta di mana setiap 1 orang polisi melayani 244 penduduk.

Gambar 3.1. Rasio Penduduk per Polisi di DIY, Tahun 2016



Sumber : Polda D.I. Yogyakarta

Polisi di D.I. Yogyakarta mayoritas berjenis kelamin laki-laki (Tabel 3). Perbandingan polisi perempuan dengan laki-laki mencapai 1:13. Hal ini merupakan hal yang wajar karena perekrutan polisi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pos polisi dan poskamling juga merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa di D.I. Yogyakarta ada 26,71 persen desa/kelurahan mempunyai pos polisi, sedangkan 83,33 persen desa/kelurahan mempunyai poskamling (Tabel 4).

Pada tahun 2014 jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta sebanyak 26.164 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:60 artinya setiap 1 desa/kelurahan dilayani 60 hansip. Bila dilihat per kabupaten/kota, rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:31 artinya setiap 1 desa dilayani oleh 31 orang hansip, sedangkan rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:86 artinya setiap desa dilayani oleh sekitar 86 orang hansip.

3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

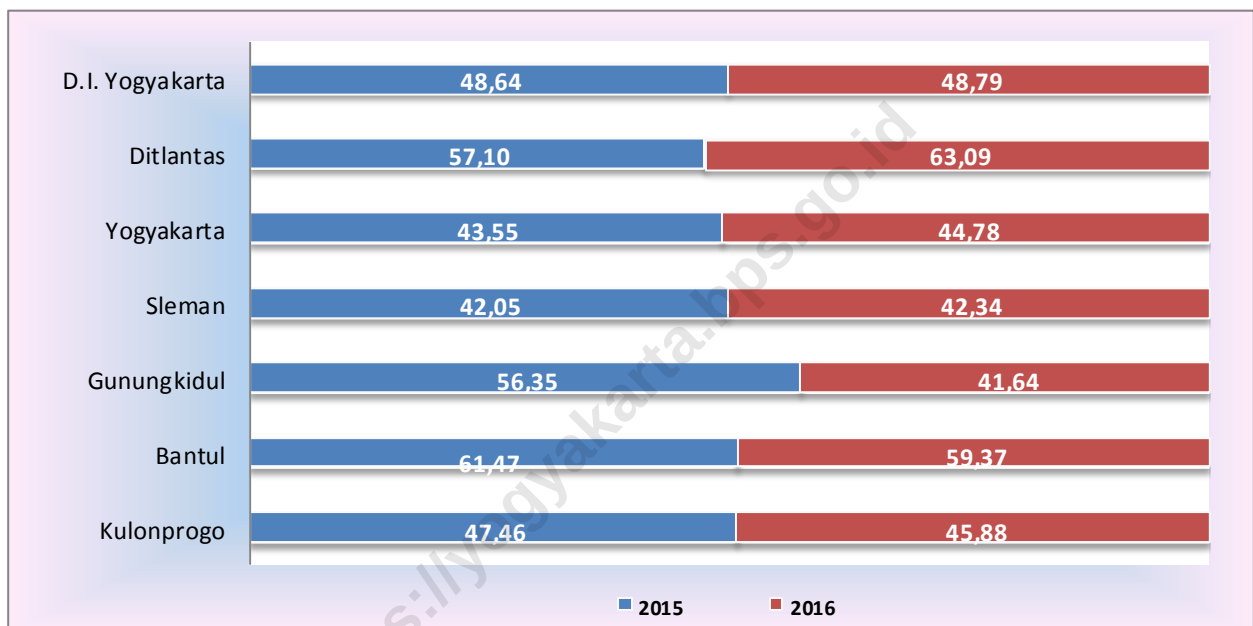
Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,42 persen. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,96 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah tindak kejahatan. Bila dilihat menurut jenis tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 terbanyak kasus penipuan atau perbuatan curang yakni sebanyak 881 kasus, disusul pencurian dengan pemberatan (767 kasus) dan pencurian biasa (619 kasus). Kondisi ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2015 tercatat kasus penipuan atau perbuatan curang juga paling mendominasi (1.698 kasus), diikuti pencurian biasa (770 kasus) dan urutan ketiga pencurian dengan pemberatan (759 kasus).

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi pada tahun 2016 sebesar 48,79 persen dapat diselesaikan, sedikit lebih besar dibanding tahun 2015 yang mencapai 48,64 persen. Secara rinci persentase penyelesaian tindak pidana di D.I. Yogyakarta disajikan pada tabel 8. Jika dilihat menurut wilayah, persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi terjadi di Polda (63,09 persen), diikuti Kabupaten Bantul (59,37 persen) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (41,64 persen).

Selanjutnya jika dilihat menurut selang waktu terjadi tindak kejahatan di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta cukup bervariasi. Hal ini dapat dilihat di tabel 9. Pada tahun 2015 selang waktu tindak kejahatan (*Crime clock*) di D.I. Yogyakarta adalah 1 jam 17 menit 24 detik, artinya setiap 1 jam 17 menit 24 detik di D.I. Yogyakarta terjadi 1 kasus tindak kejahatan.

Kondisi ini lebih lambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1 jam 13 menit 12 detik, hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta semakin berkurang. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul mempunyai selang waktu tindak kejahatan paling lama yaitu lebih dari 24 jam, diikuti Kabupaten Kulonprogo yaitu lebih dari 19 jam, dan yang tercepat terjadi di Kabupaten Sleman.

Gambar 3.2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2015-2016



Sumber: Polda D.I. Yogyakarta

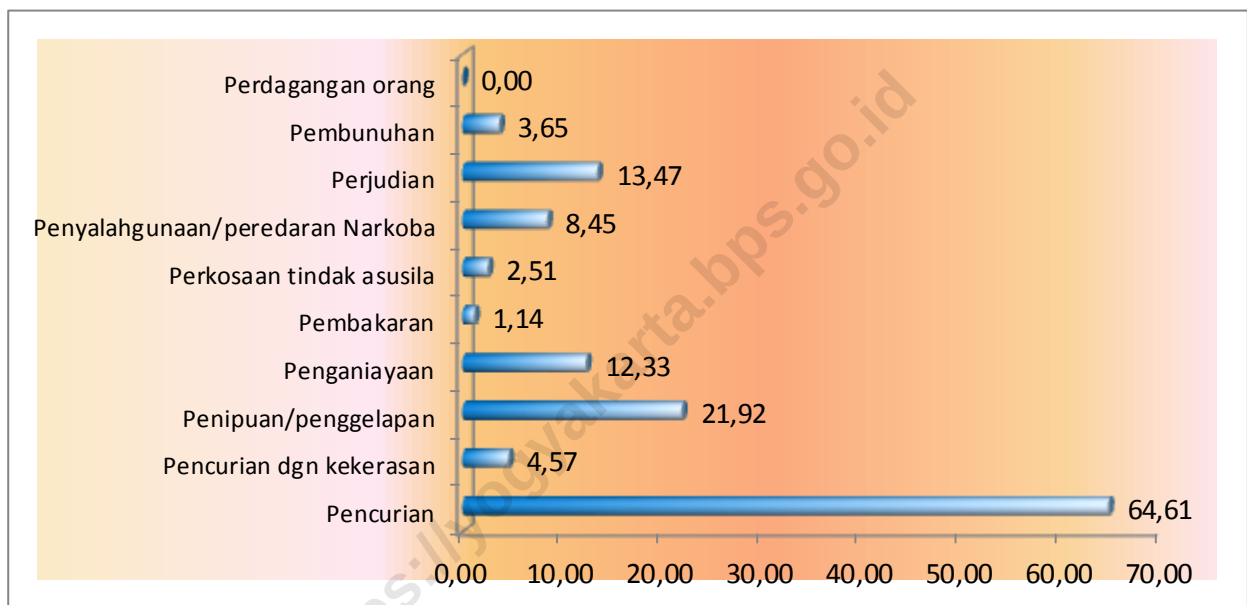
Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan semakin tidak amannya suatu wilayah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, resiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun 2016 hanya di Kabupaten Bantul yang mengalami peningkatan, sedang 4 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Secara umum pada tahun 2016, setiap 100.000 penduduk di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 188 penduduk yang beresiko terkena tindak kejahatan. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang paling beresiko terkena tindak kejahatan (438) diikuti Kabupaten Sleman dan terendah Kabupaten Gunungkidul. Data resiko penduduk terkena tindak kejahatan per – 100.000 penduduk tahun 2014 - 2016 dapat dilihat pada tabel 10.

3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan.

Menurut hasil Podes 2014, 64,61 persen desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta terdapat kejadian tindak kejahatan pencurian, 21,92 persen ada kejadian tindak kejahatan

penipuan/penggelapan dan 13,47 persen ada kejadian tindak kejahatan perjudian. Perhatian pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan, karena di D.I. Yogyakarta terdapat 8,45 persen desa/kelurahan ada kejadian tindak kejahatan “penyalahgunaan/pengedaran narkoba”. Jika diamati berdasarkan jenis kejahatan, Kabupaten Sleman memiliki jumlah desa terbanyak dengan berbagai jenis tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lain.

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta 2014



Sumber: BPS, Podes 2014

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2014 di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di 12 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi pada jenis perkelahian antar kelompok warga. Kasus tersebut terjadi di 5 desa/kelurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian antar desa/kelurahan yang terjadi di 4 desa/kelurahan, dan perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa terjadi di 2 desa/kelurahan.

Bila dilihat menurut golongan kejahatan, pada tahun 2016 kasus kejahatan yang menonjol di D.I. Yogyakarta adalah kejahatan merugikan kekayaan negara. Diikuti tindak kejahatan konvensional yang selama periode 2015 sampai dengan 2016 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015 kejahatan konvensional mencapai 8.490 kasus, menurun menjadi 7.750 kasus tahun 2016. Golongan kejahatan terbanyak ketiga adalah Kejahatan Gangguan, pada tahun 2015 mencapai 255 kasus kemudian meningkat menjadi 293 kasus pada tahun 2016.

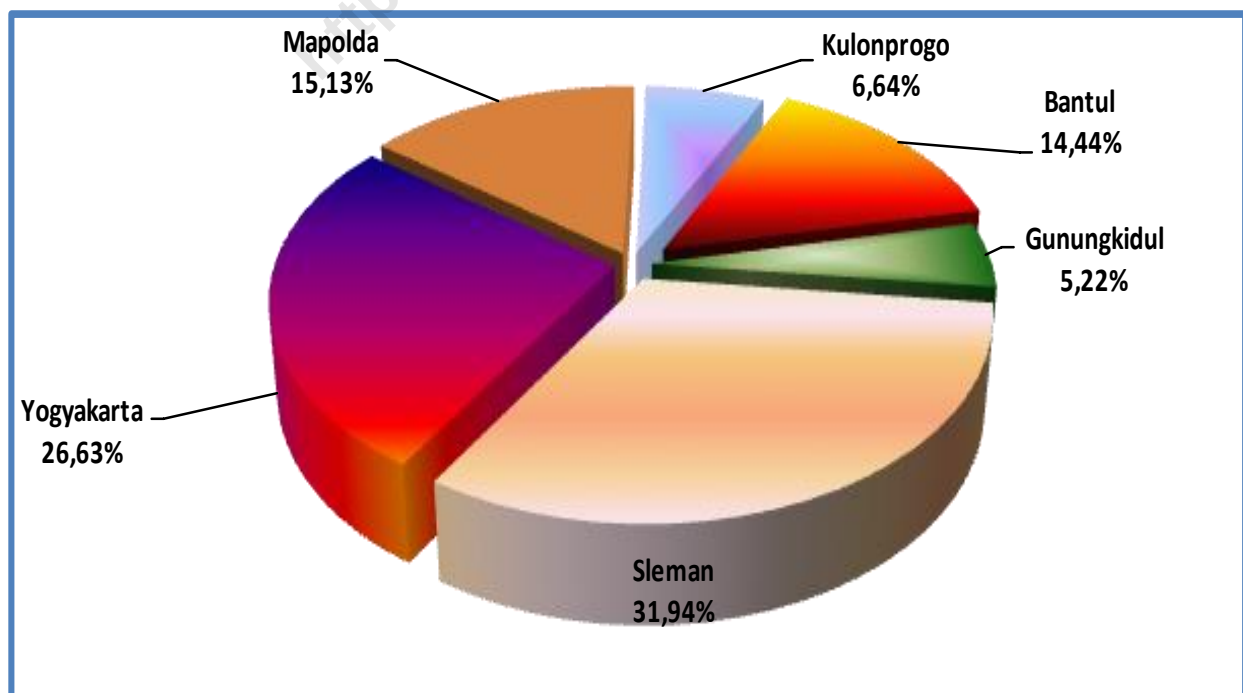
Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2016 di berbagai wilayah di D.I. Yogyakarta, salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah

kejadian kejahatan narkoba. Selama 3 tahun terakhir jumlah tindak kejahatan narkoba yang dilaporkan di D.I. Yogyakarta terus meningkat yaitu sebanyak 125 kasus (2015) menjadi 185 kasus (2016). Pada tabel 15 tampak bahwa selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, terdapat 3 jenis kejahatan yang selalu menonjol di D.I. Yogyakarta yaitu pelanggaran lalu lintas, penipuan atau tindakan curang, dan pencurian biasa – ringan. Namun pada tahun 2016 tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggeser pencurian biasa – ringan, sehingga urutannya menjadi pelanggaran lalu lintas, penipuan atau tindakan curang, dan pencurian dengan pemberatan. Persentase jumlah kejahatan tahun 2016 untuk ketiga jenis tindak kejahatan tersebut adalah 80,62 persen dari total kejahatan.

3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, informasi tentang pelaku tindak kejahatan juga perlu diperhatikan secara serius. Pada tahun 2016 pelaku tindak kejahatan di DIY sebanyak 6.772 orang. Tercatat 6 orang pelaku kejahatan adalah anak-anak (0,09 persen) semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari Kabupaten Sleman.

Gambar 3.4 Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016



Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta

Jika dilihat menurut jenis kelamin, secara umum pelaku tindak kejahatan didominasi oleh laki-laki (95,23 persen). Sementara itu jika dirinci menurut wilayah, maka akan terlihat persentase kejadian di Kabupaten Sleman, diikuti Kota Yogyakarta dan paling sedikit Kabupaten Gunungkidul, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4.

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, diantaranya dengan membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun poskamling 83,33 persen, membentuk regu keamanan lingkungan 70,78 persen, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan 75,11 persen, menambah jumlah anggota hansip/linmas 44,52 persen, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 85,62 persen.

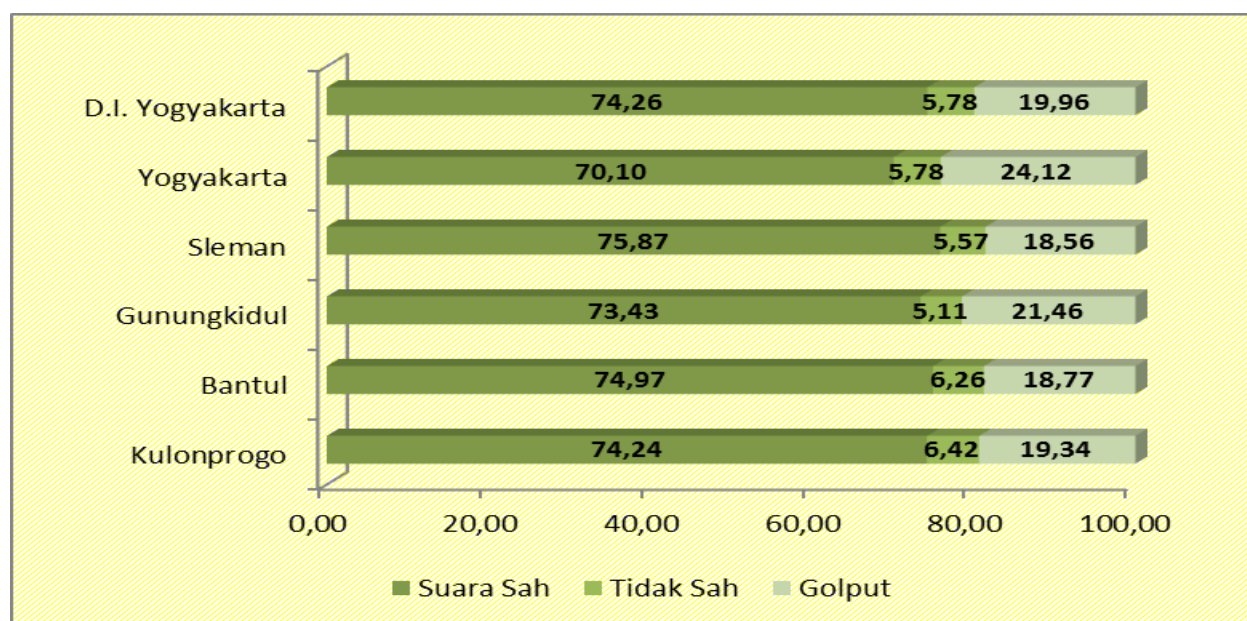
BAB IV. GAMBARAN UMUM POLITIK D.I. YOGYAKARTA

4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di D.I. Yogyakarta. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat D.I. Yogyakarta. Pada pemilu tahun 2009 ada 15 partai di DPRD Provinsi, sedangkan pada pemilu 2014 hanya terdapat 10 partai yang mendapat kursi di DPRD, walaupun secara perolehan suara sah masih didominasi oleh partai-partai lama. Hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Menurut data KPUD D.I. Yogyakarta jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 2.771.964 jiwa. Dari jumlah tersebut 80,04 persen menggunakan hak pilih dan 19,96 persen golput. Dari jumlah suara yang masuk ada 74,26 persen suara dinyatakan sah dan 5,78 persen suara tidak sah (Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta



Sumber: KPU Kabupaten/kota/D.I. Yogyakarta

Menurut data KPUD D.I. Yogyakarta jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 sebanyak 2.812.144 jiwa. Dari angka tersebut ada 76,84 persen yang menggunakan hak pilih dan 23,06 persen golput. Sementara itu suara yang sah sebesar 98,50 persen.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tabel 24 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2015. Dalam tabel tersebut tampak bahwa paling banyak ada 10 partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten/kota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempunyai kursi yang terbanyak di semua kabupaten/kota kecuali di Kabupaten Kulonprogo. Tiga kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di DIY masing-masing berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (50 orang), Kabupaten Gunungkidul (45 orang), dan Kabupaten Bantul (45 orang).

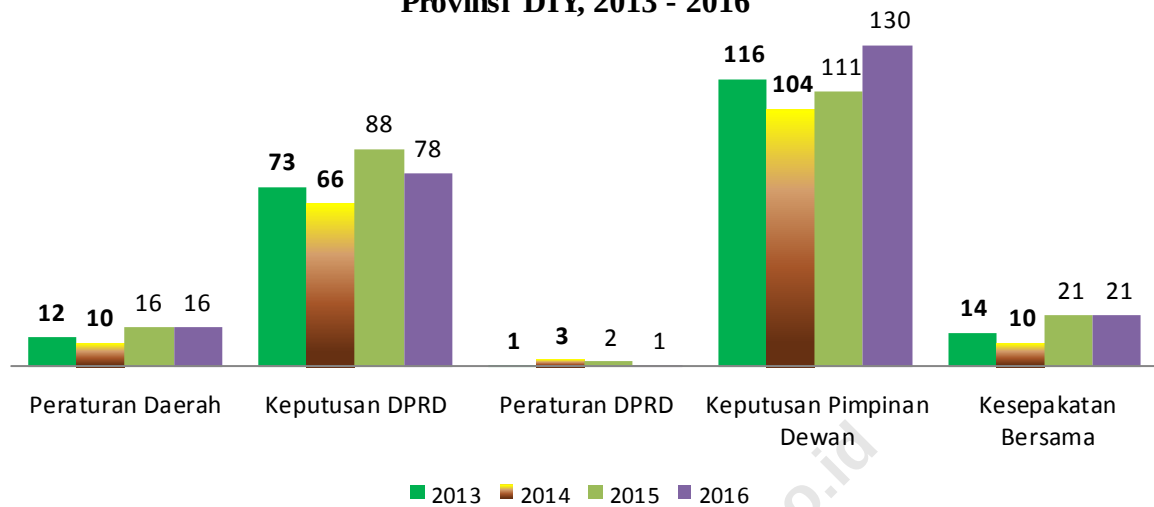
4.2 Peran DPRD

Salah satu peran DPRD adalah memberikan persetujuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang di dalamnya mencakup anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua sektor itu merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2016, di D.I. Yogyakarta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai sekitar 27,50 persen dari total anggaran. Alokasi ini mengalami peningkatan dibanding alokasi anggaran sektor pendidikan pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,08 persen. Jumlah anggaran pendidikan tahun 2016 juga sudah melebihi dari anggaran pendidikan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 20 persen. Hal ini merupakan perwujudan perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pembangunan sektor pendidikan.

Sektor kesehatan juga tak kalah penting dibandingkan sektor pendidikan. Pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di D.I. Yogyakarta mencapai sekitar 9,74 persen, atau turun 0,12 persen dibanding tahun 2015. Persentase anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran kesehatan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 10 persen.

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD. 2 dari 5 jenis produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi DIY mengalami penurunan, 2 lainnya tetap dan hanya 1 produk hukum yaitu keputusan Pimpinan Dewan yang meningkat. Perkembangan jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD DIY tahun 2013 - 2016 seperti terlihat pada gambar 4.2 berikut ini.

**Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan DPRD
Provinsi DIY, 2013 - 2016**



Sumber: Sekwan DPRD D.I . Yogyakarta

4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika aturan bernegara menyebabkan istilah-istilah politik terkait penyelenggaraan pemilu di daerah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Pilkada di bawah era Otonomi Daerah terkait penyelesaian sengketa ada di Mahkamah Agung (MA). Kemudian muncul UU yang baru nomor 22 tahun 2007, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu sehingga disebut Pemilukada. Penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tahun 2011 terbit undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang itu tidak lagi disebut Pemilukada tetapi disebut dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota. Hal itu sesuai dengan UUD yang menyebutkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur, walikota atau bupati.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undnag No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan

judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Tabel 33 sampai dengan tabel 36 menyajikan data tentang pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih, jumlah pasangan calon, dan karakteristik pasangan terpilih pada pilkada tingkat kabupaten/kota terakhir di D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 19 Juni 2011 dan Kota Yogyakarta tanggal 25 September 2011. Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT terbesar, lebih dari 70 persen ada di Bantul dalam pilkada di tahun 2015. Selain itu, perolehan suara untuk pasangan bupati terpilih di Kabupaten Bantul mencapai 52,80 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di Kabupaten Bantul sudah cukup baik.

4.4. Perkembangan Demokrasi di D.I. Yogyakarta

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih

di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Freedom House melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

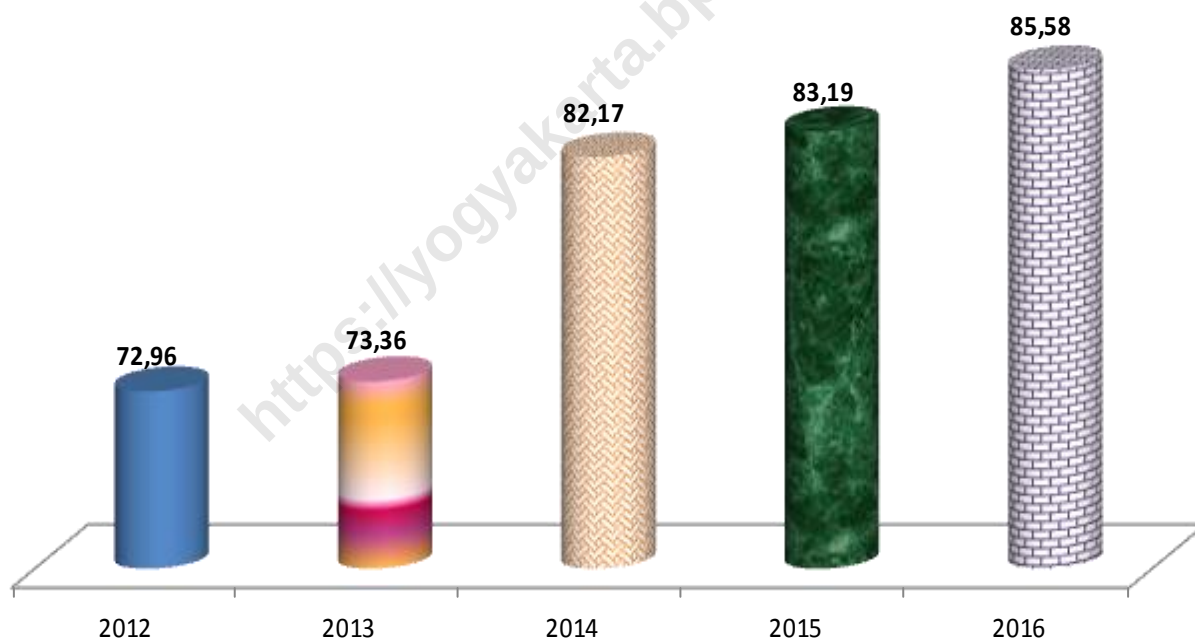
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI

Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011 dan sebagainya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta 2016 sebesar 85,58 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 2,39 poin dibandingkan dengan IDI D.I. Yogyakarta 2015 yang sebesar 83,19. Dengan pencapaian nilai IDI tahun ini, tingkat kinerja demokrasi di DIY tetap pada kategori baik. Perkembangan IDI D.I. Yogyakarta dari 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan (2012 sebesar 72,96; 2013 sebesar 73,36; 2014 sebesar 82,17; 2015 sebesar 83,19 dan 2016 sebesar 85,58).

Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta, 2012 - 2016

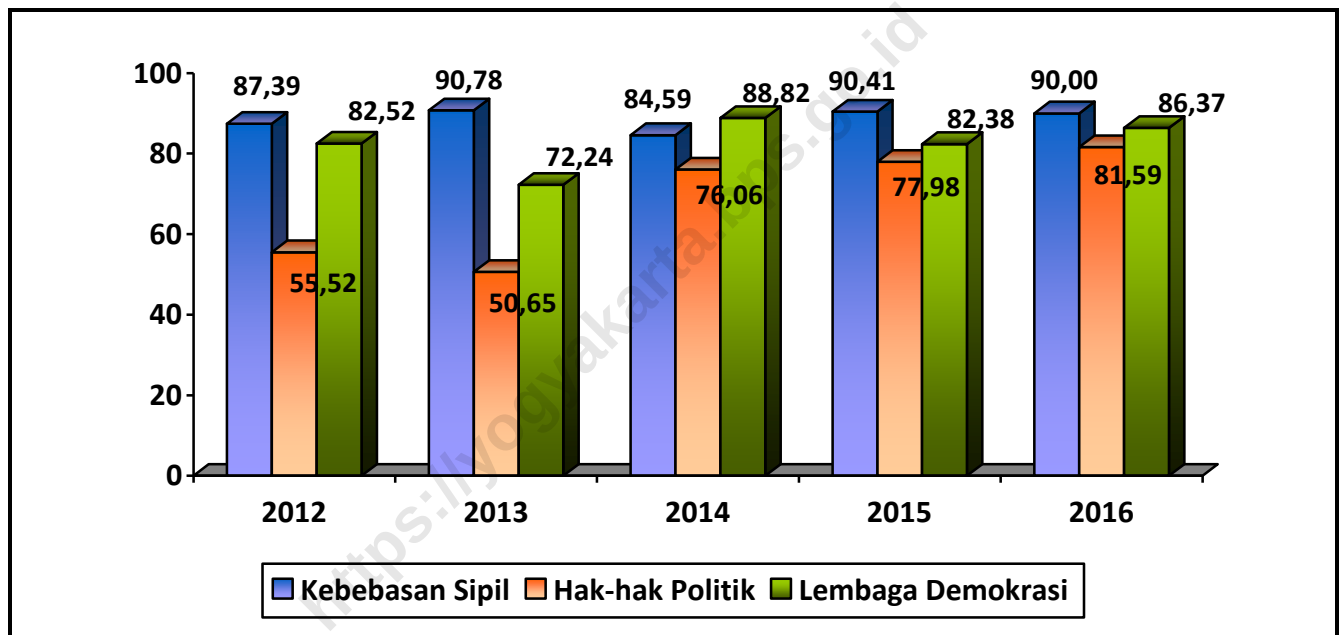


Sumber: BPS

Angka IDI 2016 tersebut merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 90,00; aspek hak-hak politik sebesar 81,59; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 86,37. Secara lebih rinci, pada 2016 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 3,61 dan 3,99 poin. Sementara nilai aspek hak-hak politik cenderung mengalami penurunan 0,41 poin. Walaupun terjadi penurunan indeks, aspek kebebasan sipil masih menjadi yang tertinggi diantara aspek yang

lain. Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang” dan “buruk”, pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “sedang”. Dari data IDI 2016 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkurang cukup banyak.

Grafik 4.4 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2012-2016



Sumber: BRS IDI 2016, BPS

TABEL - TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
01 Kulonprogo	586,28	12	88	412 611
02 Bantul	506,85	17	75	995 822
03 Gunungkidul	1 485,36	18	144	709 103
04 Sleman	574,82	17	86	1 197 833
71 Yogyakarta	32,50	14	45	405 543
34 D.I. Yogyakarta	3 185,81	78	438	3 720 912

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/polresta	Polsek/polsekta	Pos Polisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	-	1	12	15
02	Bantul	-	1	17	1
03	Gunungkidul	-	1	18	15
04	Sleman	1	1	19	2
71	Yogyakarta	-	1	14	27
Jumlah		1	5	80	60

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten/Kota		Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	1 053	62	1 115	1:370
02	Bantul	1 416	113	1 529	1:651
03	Gunungkidul	966	66	1 032	1:687
04	Sleman	1 812	125	1 937	1:618
05	Yogyakarta	1 558	102	1 660	1:244
06	MAPOLDA DIY	2 563	226	2 789	-
D.I. Yogyakarta		9 368	694	10 062	1:370

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Pos Polisi	Pos Kamling
(1)		(2)	(3)
01	Kulonprogo	16	63
02	Bantul	23	63
03	Gunungkidul	25	125
04	Sleman	29	83
71	Yogyakarta	24	31
34	D.I.Yogyakarta	117	365

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)	(2)	(3)
01 Kulonprogo	5 856	67
02 Bantul	6 429	86
03 Gunungkidul	4 411	31
04 Sleman	6 579	77
05 Yogyakarta	2 889	64
D.I.Yogyakarta	26 164	60

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulonprogo	347	453	449
02 Bantul	858	955	977
03 Gunungkidul	303	362	353
04 Sleman	1 843	2 259	2 161
05 Yogyakarta	1 883	1 947	1 802
06 MAPOLDA DIY	1 054	1 219	1 024
D.I.Yogyakarta	6 288	7 195	6 766

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*)
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulonprogo	161	215	206
02 Bantul	486	587	580
03 Gunungkidul	171	204	147
04 Sleman	771	950	915
05 Yogyakarta	936	848	807
06 MAPOLDA DIY	538	696	646
D.I.Yogyakarta	3 063	3 500	3 301

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*)
di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulonprogo	46,40	47,46	45,88
02 Bantul	56,64	61,47	59,37
03 Gunungkidul	56,44	56,35	41,64
04 Sleman	41,83	42,05	42,34
05 Yogyakarta	49,71	43,55	44,78
06 MAPOLDA DIY	51,04	57,10	63,09
D.I.Yogyakarta	48,71	48,64	48,79

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 9. Selang Waktu (*Crime Clock*) Tindak Kejahatan Menurut Golongan Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 - 2016 (menit)

Kabupaten/Kota		2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	25.14'48"	19.20'24"	19.30'36"
02	Bantul	10.12'36"	09.10'12"	08.58'12"
03	Gunungkidul	28.54'36"	24.12'00"	24.49'12"
04	Sleman	04.45'00"	03.52'48"	04.03'00"
05	Yogyakarta	04.39'00"	04.30'00"	04.51'36"
06	MAPOLDA DIY	08.18'36"	07.11'24"	08.33'00"
D.I.Yogyakarta		01.23'24"	01.13'12"	01.17'24"

Sumber : Polda D.I..Yogyakarta

Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota		2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	79	104	103
02	Bantul	93	104	106
03	Gunungkidul	40	48	47
04	Sleman	171	209	200
05	Yogyakarta	457	473	438
D.I.Yogyakarta		174	200	188

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenisnya per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Jenis Perkelahian	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Antar kelompok warga	-	3	1	1	-	5
2. Warga antar Desa/kelurahan	-	2	1	1	-	4
3. Warga dengan aparat keamanan	-	-	-	-	-	-
4. Warga dengan aparat pemerintah	-	-	-	-	-	-
5. Antar Pelajar/Mahasiswa	-	-	-	-	2	2
6. Antar Suku	-	1	-	-	-	1
Jumlah	-	6	2	2	2	12

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pencurian	63	39	67	72	42	283
2. Pencurian dengan Kekerasan	-	5	1	7	7	20
3. Penipuan/ Penggelapan	15	15	13	23	30	96
4. Penganiayaan	8	13	5	15	13	54
5. Pembakaran	1	-	1	2	1	5
6. PerkosaanTindak Asusila	1	3	2	4	1	11
7. Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	1	8	2	20	6	37
8. Perjudian	10	13	15	13	8	59
9. Pembunuhan	1	2	1	9	3	16
10. Perdagangan Orang	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 13. Banyaknya Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pembunuhan	0	4	2	1	1	5
2. Penganiayaan Berat	0	82	0	0	4	119
3. Penganiayaan Ringan	20	0	16	197	170	200
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	17	25	9	85	25	157
5. Perkosaan	0	2	0	3	2	3
6. Pencabulan	0	2	2	48	3	59
7. Penculikan	0	0	0	4	1	14
8. PencurianPencurian dengan kekerasan	18	36	0	54	227	171
9. Pencurian biasa	10	60	47	311	194	619
10. Pencurian Kendaraan Bermotor	42	154	10	161	212	563
11. Pencurian dengan Pemberatan	10 0	95	76	256	61	767
12. Pengrusakan / Penghancuran Barang	8	14	0	52	43	113
13. Pembakaran Dengan Sengaja	0	3	0	4	1	4
14. Narkoba dan Psikotropika	0	43	14	65	0	185
15. Penipuan / Perbuatan Curang	40	88	55	392	299	881
16. Penggelapan	28	61	14	230	107	417
17. Korupsi	2	0	0	1	0	4
18. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	30	0	0	0	91

Sumber : Polda dan Polres/Polresta di D.I. Yogyakarta, 2016

Tabel 14. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 - 2016

No.	Jenis Kejahatan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konvensional	6 590	8 490	7 750
2.	Trans Nasional	8	5	6
3.	Merugikan Kekayaan Negara	3 859	1 467	10 220
4.	Berimplikasi Kontijensi	1	4	0
5.	Pelanggaran HAM	0	11	1
6.	Pelanggaran Hukum	465	346	224
7.	Gangguan	354	255	293
8.	Bencana	28	59	70
Jumlah		11 305	10 637	18 564

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 15. Jumlah Penyelesaian Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2014 - 2016

No.	Jenis Kejahatan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konvensional	2 690	3 652	2 709
2.	Trans Nasional	5	0	5
3.	Merugikan Kekayaan Negara	3 356	1 031	9 462
4.	Berimplikasi Kontijensi	1	4	0
5.	Pelanggaran HAM	0	6	0
6.	Pelanggaran Hukum	377	175	44
7.	Gangguan	228	255	293
8.	Bencana	28	56	70
Jumlah		6 685	5 179	12 583

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 16. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di Provinsi D.I. Yogyakarta,
Tahun 2014 - 2016

No,	Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembunuhan	7	6	5
2.	Penganiayaan berat (Anirat)	65	76	119
3.	Penganiayaan ringan (Anira)	192	200	200
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	147	129	157
5.	Perkosaan	8	19	3
6.	Pencabulan	48	24	59
7.	Penculikan	3	7	14
8.	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	185	231	171
9.	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	284	789	619
10.	Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor)	206	569	563
11.	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	118	698	767
12.	Pengrusakan/Penghancuran Barang	49	107	113
13.	Pembakaran Dengan Sengaja	3	3	4
14.	Narkotika dan Psikotropika	103	125	185
15.	Penipuan/Perbuatan Curang	672	1 058	881
16.	Penggelapan	356	502	417
17.	Korupsi	1	2	4
18.	Permainan Judi	66	101	125
19.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	84	97	91
20.	Lalu lintas	3 750	1 440	10 207

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 17. Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Dewasa			Anak-anak			Jumlah		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kulonprogo	420	29	449	0	0	0	420	29	449
02 Bantul	923	54	977	0	0	0	923	54	977
03 Gunungkidul	344	9	353	0	0	0	344	9	353
04 Sleman	2 054	101	2 155	6	0	6	2 060	101	2 161
71 Yogyakarta	1 729	73	1 802	0	0	0	1 729	73	1 802
06 MAPOLDA DIY	973	51	1 024	0	0	0	973	51	1 024
34 D.I.Yogyakarta	6 443	317	6 766	6	0	6	6 449	317	6 772

Sumber : Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 18. Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Jenis Upaya menjaga Keamanan				
		1	2	3	4	5
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo	63	44	27	49	60
02	Bantul	63	48	38	69	66
03	Gunungkidul	125	101	36	102	127
04	Sleman	83	85	67	72	81
71	Yogyakarta	31	32	27	37	41
34	D.I.Yogyakarta	365	310	195	329	375

Sumber : BPS, Podes 2014

Keterangan :

1 : Membangun Pos Kamling

2 : Membentuk regu keamanan lingkungan

3 : Menambah jumlah anggota hansip/linmas

4 : Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan

5 : Lainnya

Tabel 19. Jumlah Jaksa dan Non Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2016

Kabupaten/Kota		Jaksa			Non Jaksa (Staf)		
		L	P	L+P	L	P	L+P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kejaksaan Negeri Wates	11	9	20	24	14	38
02	Kejaksaan Negeri Bantul	11	12	23	50	17	67
03	Kejaksaan Negeri Wonosari	9	7	16	32	12	44
04	Kejaksaan Negeri Sleman	18	11	29	38	31	69
05	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	12	18	30	41	19	60
06	Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta	76	62	138	85	47	132
Jumlah		137	119	256	270	140	410

Sumber : Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

Tabel 20. Jumlah Hakim dan dan Non Hakim menurut Jenis Kelamin di Tingkat Pengadilan di Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2016

Tingkat Pengadilan		Hakim ^{*)}		Panitera		Juru Sita		PNS/Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta	23	5	25	16	0	0	29	19
02	Pengadilan Negeri Wates	4	4	10	10	3	0	23	5
03	Pengadilan Negeri Bantul	4	5	13	11	2	0	18	13
04	Pengadilan Negeri Wonosari	4	3	9	9	8	2	45	21
05	Pengadilan Negeri Sleman	12	7	13	9	4	0	28	11
06	Pengadilan Negeri Yogyakarta	18	13	9	21	4	2	70	53
07	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	22	3	9	1	0	0	14	12
08	Pengadilan Agama Yogyakarta	13	6	6	6	3	5	2	9
09	Pengadilan Agama Sleman	9	4	7	7	5	6	3	3
10	Pengadilan Agama Bantul	5	3	5	9	6	4	2	8
11	Pengadilan Agama Wonosari	6	2	7	4	4	3	3	3
12	Pengadilan Agama Wates	5	7	9	5	7	2	9	1
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	5	7	8	3	0	0	10	12
14	Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta	3	3	2	0	0	0	25	4
Jumlah		133	72	132	111	46	24	281	174

Sumber : Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama D.I.Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta .

Tabel 21. Jumlah Perkara Penting Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi
D.I.Yogyakarta, Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun Ini	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketertiban Umum	69	69
2	Perkosaan	12	12
3	Perjudian	235	235
4	Kejahatan terhadap Nyawa	-	-
5	Penipuan	100	100
6	Penganiayaan Berat	77	77
7	Pencurian dengan Pemberatan	201	201
8	Pencurian Biasa	99	99
9	Penculikan/Melarikan	3	3
10	Pemerasan dengan Ancaman	14	14
11	Penggelapan	80	80
12	Penadahan	18	18
13	Pembunuhan	5	5
14	Pembunuhan Berencana	1	1
15	Senjata Api	--	--
16	Narkotika	231	231
17	Psikotropika	54	54
18	Hak Kekayaan Intelektual	6	6
19	Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	3	3
20	Perkara Lingkungan Hidup	1	1
21	Perbankan	0	0
22	Perkara Uang Palsu	1	1
23	Pertambangan Tanpa Ijin	13	13
24	Perdagangan orang, Perempuan dan Anak (Trafickin)	2	2
25	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33	33

Sumber : Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

Keterangan : - Perkara Penting sesuai Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-4/JA/3/1994
- Hanya Untuk Perkara Pidana

Tabel 22. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Umum, Tahun 2016

No	Unit Organisasi	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Diselesaikan	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kejari Wates		16	207	201	22
		Oharda	9	65	64	10
		TPUL	6	91	93	4
		Kamnegtibum	1	51	44	8
2.	Kejari Bantul		14	283	278	19
		Oharda	8	146	147	7
		TPUL	4	65	66	3
		Kamnegtibum	2	72	65	9
3.	Kejari Wonosari		10	106	109	6
		Oharda	4	47	48	3
		TPUL	3	31	32	1
		Kamnegtibum	3	28	29	2
4.	Kejari Sleman		48	568	377	26
		Oharda	40	327	147	7
		TPUL	7	159	155	11
		Kamnegtibum	1	82	75	8
5.	Kejari Yogyakarta		29	345	349	25
		Oharda	15	174	173	16
		TPUL	8	106	109	5
		Kamnegtibum	6	65	67	4
6.	Kejati D.I.Yogyakarta		30	256	271	15
		Oharda	14	55	65	4
		TPUL	7	150	149	8
		Kamnegtibum	9	51	57	3
Jumlah			147	1 765	1 799	113

Sumber : Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

Keterangan : - Oharda : T. P Orang dan Harta Benda

- TPUL : T.P Pidana Umum Lainnya

- Kamnegtibum : T.P Keamanan Negara dan Ketertiban Umum

Tabel 23. Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta, Tahun 2016

No.	Jenis Tindak Pidana	Sisa Tahun Lalu	Masuk	PUTUSAN				
				Menguatkan Putusan P.N.	Mengadili Sendiri	Pria	Wanita	Anak2 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pemalsuan Surat	0	2	1	0	0	1	0
3.	Kejahatan Kesusialaan	0	10	6	4	5	1	0
4.	Kejahatan Perjudian	0	3	0	2	3	0	0
5.	Meninggalkan orang yang Perlu ditolong	0	0	0	0	0	0	0
6.	Penghinaan/pencemaran nama baik	0	2	2	0	1	1	0
7.	Penganiayaan	0	16	11	5	8	5	0
8.	Menyebabkan mati/ luka karena alpha	1	0	1	0	0	0	0
9.	Pencurian	1	5	6	0	15	0	0
10.	Pemerasan dan Pengancaman	0	1	1	0	2	1	0
11.	Pengelapan	4	5	7	2	3	2	0
12.	Penipuan	0	9	7	1	9	2	0
13.	Menghancurkan atau merusak barang	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tindak Pidana Narkotika/ Psikotropika	0	20	14	4	24	1	0
15.	UU Lalu Lintas	0	4	2	2	1	0	0
16.	Fiducia	0	1	0	0	0	0	0
17.	UU Perlindungan Anak	0	4	2	0	2	0	0
18.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	10	6	2	7	0	0
19.	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tindak Pidana Lain	3	16	12	3	13	3	0
JUMLAH		9	108	78	25	93	17	0

Sumber : Pengadilan Tinggi Provinsi D.I.Yogyakarta

Keterangan : *) yang dimaksud dengan "anak2" adalah yang berumur 21 tahun dan belum kawin, sehubungan dengan pengertian "remaja".

Tabel 24. Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, Tahun 2016

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP / UU	Dewasa		Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Thd Ketertiban	154-181	3	0	0	0	3
2.	Pembakaran	187-188	1	0	0	0	1
3.	Mata Uang	244-251	2	0	0	0	2
4.	Memalsukan Materai/Surat	253-275	9	0	0	0	9
5.	Kesusilaan	281-297	10	2	0	0	12
6.	Perjudian	303	15	0	0	0	15
7.	Penculikan	324-336	2	0	0	0	2
8.	Pembunuhan	338-350	31	0	3	0	34
9.	Penganiayaan	351-356	37	10	2	1	50
10.	Pencurian	362-364	143	3	5	0	151
11.	Perampokan	365	2	0	0	0	2
12.	Pemerasan/Mengancam	368-369	4	0	1	0	5
13.	Penggelapan	372-375	41	13	0	0	54
14.	Penipuan	378	75	66	19	0	85
15.	Penadahan	480-481	2	0	0	0	2
16.	Narkotika	UU No. 35 Th. 2009	313	24	1	0	338
17.	Korupsi	UU No. 20 Th. 2001	48	2	0	0	50
18.	Pencucian Uang	UU No. 25 Th. 2003	9	5	0	0	148
19.	Laka Lantas	UU No. 22 Th. 2009	10	0	0	0	10
20.	Traficking	UU No. 21 Th. 2007	0	2	0	0	2
21.	Ilegal Logging	UU No. 41 Th. 1999	0	0	0	0	0
22.	Perlindungan Anak	UU No. 23 Th. 2002	83	1	2	0	86
23.	Keimigrasian	UU No. 9 Th. 1992	0	0	0	0	0
24.	KDRT	UU No. 23 Th. 2004	11	0	0	0	11
25.	Darurat	UU No 12 Th 1951	2	0	0	0	2
26.	Kesehatan	UU No 36 Th 2009	2	0	0	0	2
27.	Terorisme	UU No 15 Th 2003	1	0	0	0	1
Jumlah			847	81	14	1	943

Sumber : Kanwil Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

Tabel 25. Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah Seluruh PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 .	Kulonprogo	23	6	99	34	285	170	3 694	3 930
2 .	Bantul	22	3	125	37	291	226	4 842	5 927
3 .	Gunungkidul	22	2	109	29	352	143	5 587	4 504
4 .	Sleman	19	11	95	48	317	228	4 711	6 555
5 .	Kota Yogyakarta	20	5	85	45	332	337	3 301	4 035
D.I. Yogyakarta		36	9	138	84	349	254	3 927	2 825

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 26. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	1	5
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6	0	6
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13	1	14
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	2	8
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7	0	7
07.	Partai Demokrat	0	2	2
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	1	8
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Jumlah		48	7	55

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Keterangan : -

Tabel 27. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016

No,	Partai Politik	Kabupaten/Kota				
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	2	2	5	1
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	4	3	5	0
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	4	5	6	4
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8	12	11	12	15
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	5	6	4	5
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	6	6	7	5
07.	Partai Demokrat	2	1	4	1	1
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	6	7	6	5
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	4	0	4	4
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	1	0	0	0
11.	Partai Hati Nurani (Hanura)	1	0	1	0	0
Jumlah		40	45	45	50	40

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Keterangan : -

Tabel 28. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

Kabupaten/Kota		Kelompok Umur								Jumlah		
		21-35		36-49		50-59		60+		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Kulonprogo	2	2	20	4	10	1	1	0	33	7	40
02	Bantul	5	2	27	0	8	1	2	0	42	3	45
03	Gunungkidul	5	2	24	5	5	0	4	0	38	7	45
04	Sleman	5	4	25	7	6	1	1	1	37	13	50
05	Yogyakarta	3	2	16	7	8	1	3	0	30	10	40
DPRD Provinsi		0	0	23	4	19	3	5	0	48	7	55

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 29. Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

Kabupaten/Kota		Pendidikan Terakhir								Jumlah		
		≤ SLTA		D1 – D3		D4/S1		S2 – S3		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Kulonprogo	14	1	0	0	17	6	2	0	33	7	40
02	Bantul	18	0	3	1	19	2	2	0	42	3	45
03	Gunungkidul	11	3	1	0	22	2	4	2	38	7	45
04	Sleman	12	2	0	1	23	8	2	2	37	13	50
05	Yogyakarta	8	1	2	0	19	6	1	3	30	10	40
DPRD Provinsi		4	1	0	0	35	5	9	1	48	7	55

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 30. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di Provinsi D.I. Yogyakarta

DPRD Prov				
Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara tidak Sah	Golput
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kulonprogo	337 038	250 213	21 647	65 178
02 Bantul	729 469	546 853	45 669	136 947
03 Gunungkidul	599 012	439 864	30 591	128 557
04 Sleman	794 582	602 824	44 291	147 467
71 Yogyakarta	311 863	218 623	18 028	75 212
34 D.I.Yogyakarta	2 771 964	2 058 377	160 226	553 361

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 31. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Golput di Provinsi D.I. Yogyakarta

DPRD Kab/Kota				
Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kulonprogo	337 038	261 747	10 113	65 178
02 Bantul	729 675	560 727	31 574	137 374
03 Gunungkidul	599 071	453 161	17 262	128 648
04 Sleman	794 978	614 796	32 319	147 863
71 Yogyakarta	311 692	222 637	14 014	75 212
34 D.I.Yogyakarta	2 772 625	2 113 068	105 282	554 275

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 32. Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		DPR RI		DPRD Prov.		DPRD Kab/Kota	
		L	P	L	P	L	P
(1)		(2)		(3)	(4)		(5)
01	Kulonprogo			44	30	238	165
02	Bantul			84	56	263	203
03	Gunungkidul	56	40	63	44	258	189
04	Sleman			112	73	296	197
71	Yogyakarta			43	31	217	145
34	D.I.Yogyakarta	56	40	346	234	1 272	899

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 33. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah Suara Tidak Sah dan Golput di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara tidak Sah	Golput
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	335 897	264 026	4 127	69 888
02	Bantul	732 124	584 918	10 352	136 854
03	Gunungkidul	601 556	456 911	5 623	139 022
04	Sleman	818 960	659 395	9 883	149 682
71	Yogyakarta	321 425	246 341	3 588	71 494
34	D.I.Yogyakarta	2 812 144	2 211 591	33 573	566 980

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 34. Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi D I Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 (dalam rupiah)

No	Tahun	Sektor Pendidikan		Sektor Kesehatan	
		Nominal	Persentase Thd Total Anggaran	Nominal	Persentase Thd Total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	2012	618 881 769 883	-	183 177 606 180	-
02	2013	712 148 040 574	23,04	186 693 172 168	6,82
03	2014	872 166 891 980	23,77	369 481 135 361	10,07
04	2015	877 264 635 392	23,08	374 800 523 039	9,86
05	2016	1 092 817 284 144	27,50	387 122 289 647	9,74

Sumber : DPPKA Provinsi D I Yogyakarta

Tabel 35. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2013 - 2016

Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Peraturan DPRD	Keputusan Pimpinan Dewan	Kesepakatan Bersama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)
2013	12	73	1	116	14	206
2014	10	66	3	104	10	193
2015	16	88	2	111	21	238
2016	16	78	1	130	21	246

Sumber :Sekretariat DPRD D.I. Yogyakarta

Tabel 36. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	19 Juni 2011	4
02	Bantul	9 Desember 2015	2
03	Gunungkidul	9 Desember 2015	4
04	Sleman	9 Desember 2015	2
71	Kota Yogyakarta	25 September 2011	3

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabal 37. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D I Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Suara Sah	% Suara Sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	349 906	228 878	65,41
02	Bantul	695 855	495 089	71,15
03	Gunungkidul	619 825	424 810	68,54
04	Sleman	779 588	524 900	67,33
71	Kota Yogyakarta	322 872	200 726	62,17

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabal 38. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D I Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	105 965	46,30	PDI-P dan PAN
02	Bantul	261 412	52,80	Gerindra dan PKB
03	Gunungkidul	167 915	39,53	PAN, Golkar, Nasdem, Hanura
04	Sleman	297 267	56,63	PAN, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB
71	Kota Yogyakarta	97 047	48,35	PDI-P dan Golkar

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabel 39. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Provinsi D I Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo	Laki-laki	S-1/Spesialis II Kedokteran	46	Dokter Spesialis
02	Bantul	Laki-laki	S-1	58	Purnawirawan Polri
03	Gunungkidul	Perempuan	S-1	66	Bupati
04	Sleman	Laki-laki	S-2	55	Wakil Bupati
71	Kota Yogyakarta	Laki-laki	S-1	47	Wakil Walikota

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabel 40. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2012-2016

Variabel/Aspek		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kebebasan Sipil		87,39	90,78	86,25	90,41	90,00
1.1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat		90,00	98,75	46,25	100,00	95,31
1.2 Kebebasan Berpendapat		81,65	90,00	81,65	83,30	83,30
1.3 Kebebasan Berkeyakinan		93,34	94,00	95,13	86,28	94,24
1.4 Kebebasan dari Diskriminasi		74,15	80,40	80,40	99,90	80,40
2. Hak-Hak Politik		55,52	50,65	70,07	77,98	81,59
2.1 Hak Memilih dan Dipilih		52,25	52,83	77,62	77,70	77,62
2.2 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan		58,78	48,48	74,53	78,26	85,57
3. Lembaga-lembaga Demokrasi		82,52	83,69	88,82	82,38	86,37
3.1 Pemilu yang Bebas dan Adil		91,66	91,66	97,47	97,47	97,47
3.2 Peran DPRD		37,60	38,26	50,96	87,33	63,00
3.3 Peran Partai Politik		99,72	99,23	100,00	100,00	100,00
3.4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah		87,98	87,98	100,00	97,14	73,77
3.5 Peran Peradilan yang Independen		95,00	100,00	95,00	62,50	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia		71,67	72,96	82,71	83,19	85,58

Sumber : BRS IDI 2016, BPS DIY.

Tabel 41. Perkembangan Skor Indikator IDI 2015 dan 2016

Nomor	Indikator	2015	2016
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	62,50
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	95,65	95,65
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah	100,00	100,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	40,00	85,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender etnis kelompok	100,00	50,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	100,00	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100,00	100,00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	100,00
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	79,64	79,64
14	Voters turnout	80,02	80,02
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	36,36	36,36
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	56,52	76,09
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	95,05
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	100,00	67,71
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	18,75	50,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	100,00	57,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	% perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	89,47	92,11
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	58,33	58,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	25,00	100,00

Sumber : BRS IDI 2016, BPS DIY.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan - Bantul
Telp. : (0274) 4342234 - Hunting, Fax. : (0274) 4342230
E-mail : bps3400@bps.go.id Homepage : <http://yogyakarta.bps.go.id>

